

STRATEGI WACANA REKONSILIASI DAN LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PIDATO PERDANA PRABOWO SUBIANTO: SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS

Hamiruddin Udu¹, Hidrawati²

¹ Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Halu Oleo

² Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo
Corresponding Author: email: hamirudin78@uho.ac.id

Abstract

This study examines the discursive strategies employed in Prabowo Subianto's inaugural speech following his designation as the elected President of Indonesia in 2024. Using Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis (CDA) the study argues that the speech functions as a strategic instrument to construct political legitimacy and reconcile post-election polarization through a structured set of linguistic strategies. The primary data consist of the full transcript of the speech delivered at the General Elections Commission (KPU) Hall, analyzed through three dimensions of van Dijk's model: textual structure, social cognition, and social context. The findings revealed; first, at the level of textual structure, the speech is constructed around macrostructures of reconciliation and inclusivity, realized through rhetorical strategies such as the neutralization of in-group/out-group polarity, the use of family metaphors, euphemism, and presuppositions that affirm electoral legitimacy. Second, at the level of social cognition, the discourse represents post-election collective mentalities—such as political fatigue and aspirations for unity—while advancing a nationalist-populist ideology characterized by anti-elitist and religious elements. Third, at the level of social context, the speech operates as a hegemonic strategy to consolidate power, achieved through the appreciation of state institutions, symbolic reconciliation with opposition groups, and the projection of populist policies focused on public welfare. This study proved that language plays an important role Indonesian political discourse by demonstrating how linguistic resources are mobilized for strategic political purposes within an electoral democratic context.

Keywords: *critical discourse analysis; political legitimacy; reconciliation; power*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 menandai salah satu momen penting dalam transisi kepemimpinan nasional Indonesia. Setelah melalui proses kampanye, pemungutan suara, serta tahapan rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum

(KPU) secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu Presiden 2024. Penetapan ini bukan hanya merupakan puncak dari proses elektoral, tetapi juga menjadi awal dari pembentukan narasi dan arah kebijakan politik yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Dalam konteks politik kontemporer, pidato politik memiliki posisi strategis sebagai medium artikulasi visi, pernyataan ideologi, serta pembedaan relasi kuasa antara pemimpin dengan rakyat. Pidato perdana Prabowo Subianto pasca penetapan resmi oleh KPU—yang disampaikan dalam suasana kemenangan dan sorotan publik—bukan hanya bersifat seremonial, melainkan juga menyimpan petunjuk-petunjuk awal tentang arah kebijakan politik yang akan diambil pemerintah mendatang. Kajian terhadap pidato politik tersebut menjadi penting karena melalui bahasa, seorang pemimpin tidak hanya mengomunikasikan rencana kerja, tetapi juga membangun citra, membingkai tantangan, menyusun harapan, serta mengukuhkan posisi ideologisnya dalam lanskap politik nasional maupun global. Dengan demikian, pidato perdana tersebut layak dibaca secara kritis sebagai teks yang memuat konstruksi makna, representasi kekuasaan, serta kemungkinan-kemungkinan arah kebijakan negara.

Tulisan ini menggunakan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Dalam konteks itu, Van Dijk menempatkan bahasa sebagai praktik sosial yang erat kaitannya dengan produksi dan reproduksi kekuasaan serta ideologi. Dalam teori Van Dijk, wacana dipahami tidak hanya sebagai struktur linguistik, tetapi sebagai bagian dari tindakan sosial dan struktur mental yang terinternalisasi dalam praktik komunikatif (Al-Mas'udi & Al-A'mery, 2021). Dengan demikian, setiap teks, terutama pidato politik, menjadi arena di mana aktor politik berupaya mengendalikan makna, memengaruhi opini publik, serta mempertahankan atau menegosiasikan kekuasaan. Beberapa konsep kunci dalam pendekatan Van Dijk yang digunakan dalam penelitian ini meliputi makrostruktur (ide pokok atau gagasan utama yang mendasari teks), strategi retorik seperti generalisasi, amplifikasi, kontrastif, dan eufemisme, polaritas kelompok (ingroup vs. outgroup) seperti pembentukan identitas "kami" dan "mereka", dan kontrol atas wacana publik, bagaimana elit politik mendominasi ruang makna. Dengan menggunakan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya mengungkap isi pidato, tetapi juga membacanya sebagai praktik politik yang strategis dan penuh muatan ideologis.

Berdasarkan pemahaman sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan: 1) bagaimana struktur wacana dalam pidato perdana Prabowo Subianto pascapenetapan KPU mencerminkan arah kebijakan politik yang akan ditempuh pemerintah mendatang?, 2) apa saja strategi wacana yang digunakan Prabowo Subianto dalam membangun citra politik, legitimasi kekuasaan, dan konsensus publik? dan 3) bagaimana relasi antara struktur wacana pidato tersebut dengan konteks sosial-politik Indonesia pascapemilu 2024? Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi dan menganalisis struktur wacana dalam pidato perdana Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih berdasarkan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Van Dijk, 2) mengungkap strategi linguistik dan retorik yang digunakan untuk menyampaikan visi, membingkai persoalan nasional, serta membangun legitimasi kepemimpinan, dan 3) menjelaskan keterkaitan antara struktur wacana pidato dengan dinamika sosial-politik Indonesia pascapemilu, khususnya dalam membentuk arah kebijakan politik ke depan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan paradigma kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, interpretasi, dan konstruksi realitas yang terkandung dalam teks pidato politik, bukan menguji hipotesis melalui pengukuran kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2018). Paradigma kritis digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena kebahasaan, tetapi juga mengungkap relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan politik yang tersembunyi di balik praktik diskursif (Fairclough, 2013). Secara spesifik, penelitian ini menggunakan model Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Model Van Dijk dipilih karena memberikan kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif untuk mengkaji hubungan antara teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Van Dijk, 2015). Dalam perspektif Van Dijk, wacana tidak dipahami semata-mata sebagai struktur linguistik, melainkan sebagai praktik sosial yang erat kaitannya dengan produksi dan reproduksi kekuasaan serta ideologi dalam masyarakat (Al-Mas'udi & Al-A'mery, 2021).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membongkar bagaimana seorang aktor politik—dalam hal ini Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih—menggunakan bahasa secara strategis untuk membangun legitimasi, merekonsiliasi konflik pascapemilu, dan membingkai arah kebijakan politik yang akan ditempuh. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis permukaan teks, tetapi juga menggali dimensi kognitif dan kontekstual yang melatari produksi wacana tersebut.

Data primer dalam penelitian ini adalah transkrip lengkap pidato perdana Prabowo Subianto yang disampaikan pasca-penetapan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2024. Pidato tersebut disampaikan secara langsung di Aula KPU, Jakarta, dan disiarkan secara nasional melalui berbagai stasiun televisi serta kanal digital resmi.

Pemilihan pidato ini sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis: (1) pidato perdana presiden terpilih memiliki signifikansi politis yang tinggi karena menjadi pernyataan resmi pertama yang disampaikan kepada publik pasca-kontestasi elektoral; (2) pidato ini disampaikan dalam konteks polarisasi pasca-pemilu yang masih kuat, sehingga menjadi medium strategis untuk membangun rekonsiliasi dan legitimasi; (3) sebagai teks yang diproduksi oleh aktor politik puncak, pidato ini kaya akan strategi wacana yang merefleksikan ideologi, kepentingan, dan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang.

Transkrip pidato diperoleh dari sumber resmi, yaitu kanal YouTube Sekretariat Presiden dan situs web resmi KPU, serta dikonfirmasi dengan pemberitaan di media massa nasional terpercaya seperti [Kompas.com](https://www.kompas.com), [Detik.com](https://www.detik.com), dan CNN Indonesia untuk memastikan akurasi dan kelengkapan teks.

Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder di antaranya; dokumen pendukung berupa berita dan artikel media massa yang memberitakan pidato tersebut serta respons publik terhadapnya. Data ini digunakan untuk memahami konteks sosial-politik yang melatari produksi dan resepsi wacana., literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian, meliputi buku, artikel jurnal, dan prosiding yang membahas analisis wacana kritis, komunikasi politik, pidato politik, serta dinamika politik Indonesia pasca-Pemilu 2024, dokumen kebijakan dan pernyataan resmi lainnya yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto atau tim kampanyenya selama masa transisi kepemimpinan, yang digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang konsistensi wacana yang dibangun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teks pidato utama dan dokumen-dokumen pendukung. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: akses dan unduh: Mengakses kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden dan

KPU untuk mendapatkan rekaman video pidato, kemudian mengunduhnya untuk keperluan verifikasi transkrip. Melakukan transkripsi verbatim (kata demi kata) dari rekaman video pidato. Proses transkripsi dilakukan dengan cermat untuk memastikan tidak ada bagian pidato yang terlewat, termasuk unsur-unsur paralinguistik seperti jeda, penekanan, dan intonasi yang relevan dengan analisis wacana. Verifikasi dengan membandingkan hasil transkripsi dengan naskah pidato yang dipublikasikan oleh media massa resmi untuk memastikan akurasi data, serta pengarsipan data dalam format yang terstruktur dan mudah diakses untuk keperluan analisis, termasuk pemberian kode pada bagian-bagian tertentu yang akan dianalisis secara mendalam. (2) Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Peneliti melakukan penelusuran literatur melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi (Sinta) dengan menggunakan kata kunci: "analisis wacana kritis", "Teun van Dijk", "pidato politik", "Prabowo Subianto", "Pemilu 2024", "legitimasi politik", dan "rekonsiliasi pasca-pemilu". Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. (3) Penelusuran Arsip Digital, dilakukan untuk mengumpulkan berita dan artikel media massa yang memberitakan pidato tersebut. Data dikumpulkan dari portal berita online terpercaya dengan rentang waktu satu minggu sebelum dan sesudah penyampaian pidato (periode Maret-April 2024) untuk menangkap dinamika konteks sosial-politik secara utuh.

Analisis data kemudian dilakukan secara model analisis wacana kritis Teun A. van Dijk yang mencakup tiga dimensi utama: analisis teks, analisis kognisi sosial, dan analisis konteks sosial (Van Dijk, 2015; Eriyanto, 2021). Ketiga dimensi ini dianalisis secara terintegrasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang strategi wacana dalam pidato Prabowo Subianto. teknik analisisnya meliputi; (1) Analisis Teks (Dimensi Mikro); (2) Analisis Kognisi Sosial (Dimensi Meso); (3) Analisis Konteks Sosial (Dimensi Makro).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dimensi Teks

Struktur Makro

Analisis terhadap struktur makro pidato perdana Prabowo Subianto mengungkap bahwa tema rekonsiliasi nasional dan ajakan kolaborasi pascakontestasi menjadi gagasan utama yang mendasari keseluruhan teks. Temuan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Dijk (2015) bahwa struktur makro merupakan representasi dari tema global atau pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penutur kepada publik. Dalam pidato ini, Prabowo secara eksplisit menyatakan, "...kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai..." dan "Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita." Kedua pernyataan ini tidak hanya berfungsi sebagai deklarasi, tetapi juga sebagai instrumen diskursif untuk membingkai ulang realitas politik pasca-pemilu.

Menurut Fairclough (2013), praktik diskursif dalam pidato politik selalu melibatkan proses pembentukan kembali relasi kuasa dan identitas sosial. Dalam konteks ini, Prabowo melakukan apa yang dapat disebut sebagai "reframing" terhadap situasi polarisasi pascapemilu. Ia secara strategis menggeser fokus dari kontestasi yang bersifat konfliktual menuju kolaborasi yang bersifat konstruktif. Hal ini diperkuat oleh pendapat Eriyanto (2021) bahwa struktur makro dalam wacana media dan politik berfungsi untuk mengarahkan persepsi khalayak terhadap suatu isu. Dengan menempatkan rekonsiliasi sebagai tema utama, Prabowo berusaha mengendalikan interpretasi publik bahwa momen pascapemilu adalah momentum untuk bersatu, bukan untuk melanjutkan konflik.

Tema legitimasi proses demokrasi juga menjadi bagian penting dari struktur makro pidato ini. Pernyataan "*kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar*" mengandung presuposisi bahwa pemilu telah berjalan sukses dan konstitusional. Sebagaimana dijelaskan oleh Van Dijk (2008), presuposisi dalam wacana elit berfungsi untuk menanamkan asumsi-asumsi tertentu ke dalam kesadaran publik sehingga diterima sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Dalam konteks pascapemilu yang seringkali diwarnai gugatan dan ketidakpercayaan, strategi ini menjadi penting untuk menutup ruang skeptisisme dan mengukuhkan legitimasi kemenangan.

Superstruktur

Dari aspek superstruktur, pidato Prabowo mengikuti skema klasik pidato politik: pembukaan, isi, dan penutup. Namun, yang menarik adalah bagaimana elemen-elemen dalam setiap bagian disusun secara strategis untuk mencapai tujuan rekonsiliasi dan legitimasi. Pada bagian pembukaan, Prabowo memulai dengan sapaan multireligi: "*Bismillahirrahmanirrahim, salamualaikum... Shalom, Om Swastiastu, namo budaya, salam Kebajikan.*" Strategi ini, menurut Lestari (2022), merupakan bentuk "inklusivitas simbolik" yang bertujuan membangun citra pemimpin yang merangkul semua golongan. Dalam konteks Indonesia yang plural, sapaan multireligi menjadi instrumen penting untuk meredakan ketegangan sektarian dan membangun kepercayaan publik.

Lebih signifikan lagi, Prabowo menyebut lawan politiknya—Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD—sebelum menyebut partai-partai koalisi pendukungnya. Dalam analisis wacana kritis, urutan penyebutan (ordering) memiliki makna ideologis yang penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Huda & Huda (2018), penempatan suatu entitas dalam struktur wacana mencerminkan prioritas dan penghargaan simbolik yang diberikan oleh penutur. Dengan menempatkan lawan politik di posisi terhormat, Prabowo tidak hanya melakukan rekonsiliasi simbolik, tetapi juga membangun citra diri sebagai negarawan yang mengutamakan persatuan di atas kepentingan kelompok.

Bagian isi pidato memperlihatkan pola yang konsisten dalam membangun narasi rekonsiliasi. Pernyataan "*Mas Anis, Mas Muhaimin, Saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali.*" menjadi momen kunci dalam pidato ini. Penggunaan sapaan akrab "Mas" dan pengakuan atas pengalaman pribadi sebagai "yang pernah kalah" merupakan strategi retorik yang sangat efektif. Menurut Al-Mas'udi & Al-A'mery (2021), strategi ini termasuk dalam kategori "empati strategis" di mana penutur menggunakan pengalaman personal untuk membangun koneksi emosional dengan lawan dan menetralkan potensi konflik. Dengan menyatakan bahwa dirinya pernah berada di posisi yang sama, Prabowo tidak hanya menunjukkan empati, tetapi juga secara implisit mengajak lawan politiknya untuk menerima kekalahan sebagaimana ia pernah melakukannya di masa lalu.

Struktur Mikro

Polaritas Ingroup-Outgroup dan Netralisasinya

Analisis terhadap polaritas ingroup-outgroup dalam pidato ini menunjukkan kompleksitas yang menarik. Di satu sisi, terdapat pembentukan identitas "kami" sebagai pemenang melalui pernyataan "*Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar...*" Namun, di sisi lain, identitas ini segera dinetralkan melalui berbagai strategi inklusif. Van Dijk (2015) menjelaskan bahwa dalam wacana politik, polaritas "kami vs mereka" sering digunakan untuk memperkuat solidaritas internal dan membedakan diri dari lawan. Namun, dalam konteks pascapemilu yang membutuhkan rekonsiliasi, polaritas yang terlalu tajam justru kontraproduktif.

Prabowo melakukan netralisasi polaritas melalui tiga strategi utama. Pertama, penggunaan sapaan akrab "Mas" kepada lawan politik yang secara simbolis mengurangi jarak sosial dan hierarki. Kedua, pernyataan empatik "*Saya pernah berada di posisi anda*" yang menciptakan common ground antara pemenang dan yang kalah. Ketiga, pernyataan komitmen untuk bekerja bagi semua rakyat "*termasuk yang tidak memilih saya.*" Strategi ini, menurut Fairclough (2013), merupakan bentuk "hegemoni melalui konsensus" di mana kelompok dominan (pemenang pemilu) berusaha membangun legitimasi dengan merangkul kelompok lain, bukan dengan memarginalkannya.

Metafora

Penggunaan metafora dalam pidato ini sangat signifikan dalam membentuk cara publik memahami realitas pascapemilu. Metafora "keluarga besar" menjadi yang paling dominan: "*kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar.*" Menurut Lakoff & Johnson (2003) dalam teori metafora konseptualnya, metafora keluarga membawa serta seperangkat asumsi tentang loyalitas, tanggung jawab bersama, dan penyelesaian konflik secara internal. Dalam konteks politik Indonesia yang sangat menjunjung nilai kekeluargaan, metafora ini sangat efektif untuk meringkaskan perbedaan politik sebagai persoalan internal yang tidak perlu dibawa ke ranah konflik terbuka.

Metafora lain yang tidak kalah penting adalah "kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas." Dengan menggunakan metafora suhu/cuaca, Prabowo menggambarkan ketegangan politik sebagai sesuatu yang alami dan sementara—seperti cuaca yang pasti berlalu. Hal ini sejalan dengan temuan Chilton (2004) bahwa metafora cuaca dalam wacana politik berfungsi untuk mereduksi ancaman struktural menjadi fenomena

temporer yang dapat dikelola. Dengan demikian, publik diajak untuk tidak menganggap serius perbedaan politik karena semuanya akan "dingin" seiring waktu.

Metafora "menggali kesadaran dan cinta tanah air" juga menarik untuk dianalisis. Kata "menggali" mengasosiasikan nasionalisme sebagai sesuatu yang sudah ada di kedalaman diri, menunggu untuk diaktifkan, bukan sebagai konstruksi sosial yang perlu dibangun dari nol. Hal ini memperkuat ideologi esensialisme kebangsaan yang menjadi fondasi wacana nasionalis Indonesia (Anderson, 2006).

Eufemisme

Penggunaan eufemisme dalam pidato ini menunjukkan kesadaran Prabowo akan sensitivitas situasi pascapemilu. Ungkapan " *mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa*" digunakan untuk menggantikan realitas yang lebih keras seperti "kalah," "protes," atau "menolak hasil pemilu." Menurut Van Dijk (2008), eufemisme dalam wacana elit berfungsi untuk mengontrol persepsi publik dengan membingkai realitas negatif dalam bahasa yang lebih lunak dan dapat diterima.

Eufemisme "*pedas di telinga*" untuk menggambarkan kritik media juga merupakan strategi yang cerdas. Dengan menyebut kritik sebagai sesuatu yang "pedas di telinga," Prabowo mengakui keberadaan kritik sambil tetap menampilkan diri sebagai pemimpin yang terbuka dan toleran. Sebagaimana dicatat oleh Lestari (2022), strategi ini membangun citra "negara yang demokratis" tanpa harus mengakui secara eksplisit kesalahan atau kekurangan.

Hal yang paling signifikan adalah eufemisme dalam permohonan maaf: "*kurang pantas, kurang berkenan*." Frasa ini digunakan untuk menggantikan pengakuan atas kesalahan spesifik selama kampanye. Dalam analisis wacana kritis, strategi ini disebut sebagai "face-saving act" di mana penutur melakukan rekonsiliasi tanpa harus kehilangan muka atau mengakui kesalahan secara eksplisit (Brown & Levinson, 1987).

Presuposisi

Presuposisi menjadi senjata paling ampuh dalam pidato ini untuk membangun legitimasi. Pernyataan "*Kita telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana diamanatkan UUD*" mengandung asumsi bahwa pemilu berjalan sukses dan konstitusional—asumsi yang mungkin tidak sepenuhnya disetujui oleh semua pihak. Van Dijk (2015) menjelaskan bahwa presuposisi dalam wacana elit berfungsi untuk

menanamkan ideologi tertentu ke dalam kesadaran publik tanpa harus melalui proses argumentasi yang panjang.

Presuposisi "*Rakyat menuntut semua unsur pimpinan harus bekerja sama*" juga sangat strategis. Dengan menyatakan bahwa rakyat menuntut kolaborasi, Prabowo membangun mandat moral bagi agendanya sekaligus menutup ruang bagi oposisi yang ingin melanjutkan konflik. Sebagaimana dikemukakan oleh Fairclough (2013), klaim tentang "kehendak rakyat" sering digunakan dalam wacana politik untuk melegitimasi kebijakan tertentu dengan asumsi bahwa kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi publik.

Presuposisi yang paling menarik adalah dalam pernyataan "*Saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya.*" Kalimat ini secara implisit mengakui adanya polarisasi elektoral, tetapi sekaligus membangun citra inklusif. Dengan kata lain, presuposisi ini mengakui realitas konflik sambil menawarkan resolusi yang menguntungkan penutur.

Analisis Dimensi Kognisi Sosial

Representasi Mental Kolektif Pasca-Pemilu

Analisis terhadap kognisi sosial dalam pidato ini mengungkap bahwa Prabowo secara cermat merepresentasikan kondisi mental kolektif publik pasca-Pemilu 2024. Pernyataan "*kontestasi... cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga, pikiran... kita semua lelah*" menunjukkan kesadaran akan kelelahan politik yang dialami masyarakat. Menurut Van Dijk (2014), kognisi sosial merujuk pada representasi mental yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks ini, Prabowo tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menunjukkan pemahamannya terhadap kondisi psikologis publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur Budiman et al. (2022) tentang populisme di Indonesia yang menunjukkan bahwa tokoh politik sering memanfaatkan "kelelahan publik" sebagai modal untuk membangun legitimasi. Dengan mengakui kelelahan tersebut, Prabowo memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memahami dan merasakan apa yang dirasakan rakyat—sebuah strategi yang dalam literatur komunikasi politik disebut sebagai "emotional resonance" (Brader, 2006).

Representasi harapan akan persatuan juga menjadi bagian penting dari kognisi sosial yang dibangun. Pernyataan "*rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja*

sama, harus kolaborasi" tidak hanya menggambarkan aspirasi publik, tetapi juga secara implisit membangun mandat bagi agenda rekonsiliasi yang ditawarkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mutz (2015) dalam studinya tentang deliberasi politik, klaim tentang "kehendak rakyat" sering digunakan untuk menutup ruang perdebatan dan memaksakan konsensus.

Ideologi yang Diusung

Analisis ideologis terhadap pidato ini mengungkap tiga pilar utama yang menjadi fondasi wacana Prabowo: nasionalisme, populisme, dan religiusitas inklusif. **Nasionalisme** direpresentasikan melalui penekanan pada identitas kebangsaan dan persatuan. Frasa "*kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar, kita sama-sama anak bangsa Indonesia*" menjadi mantra yang diulang-ulang untuk membangun solidaritas nasional. Menurut Anderson (2006), nasionalisme adalah bentuk "komunitas terbayang" (imagined community) yang dibangun melalui narasi-narasi kebersamaan. Dalam konteks pascapemilu yang terpolarisasi, narasi nasionalisme menjadi perekat yang efektif untuk mengatasi perbedaan politik.

Populisme tercermin dari fokus yang intens pada "rakyat" sebagai pusat legitimasi. Istilah "rakyat" disebut berulang kali dalam berbagai konteks: "*berjuang untuk rakyat kita*," "*rakyat yang masih banyak mengalami kesusahan*," "*rakyat menuntut*." Menurut Mudde & Rovira Kaltwasser (2017), populisme adalah ideologi yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok homogen: "rakyat murni" dan "elit korup." Dalam pidato ini, meskipun tidak secara eksplisit mengkonstruksi elit sebagai korup, terdapat seruan agar "*elit Indonesia harus bekerja sama*" yang secara implisit mengkritik elit yang selama ini sibuk dengan konflik.

Religiusitas inklusif menjadi pilar ketiga yang tidak kalah penting. Sapaan multireligi di awal dan akhir pidato menunjukkan pengakuan terhadap pluralitas agama di Indonesia. Dalam konteks politik Indonesia pasca-Reformasi, pencitraan sebagai pemimpin religius-inklusif menjadi modal politik yang sangat berharga (Barton, 2021).

Representasi Kelompok dan Model Mental Penutur

Analisis terhadap representasi kelompok dalam pidato ini menunjukkan pola yang konsisten dengan strategi rekonsiliasi. Rakyat direpresentasikan sebagai pihak yang berdaulat tetapi juga "menderita," sehingga membutuhkan kepemimpinan kuat. Lawan politik direpresentasikan sebagai mitra seperjuangan yang dihormati. Partai koalisi

direpresentasikan sebagai pendukung setia yang disebut satu per satu. Media direpresentasikan sebagai mitra kritis yang vital meskipun "pedas di telinga."

Yang paling signifikan adalah representasi diri penutur melalui model mental yang dibangun. Pengakuan "*Saya pernah berada di posisi anda*" menjadi kunci dalam membangun kredibilitas sebagai figur rekonsiliatif. Menurut Van Dijk (2014), model mental penutur mencakup pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang memengaruhi produksi wacana. Dengan latar belakang sebagai mantan Danjen Kopassus, pengusaha, dan politisi yang pernah dua kali kalah dalam pilpres, Prabowo memiliki pengalaman unik yang dimobilisasi dalam pidato ini untuk membangun legitimasi.

Analisis Dimensi Konteks Sosial

Level Makro

Analisis pada level makro mengungkap bahwa pidato ini tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dan ideologi dominan dalam masyarakat Indonesia pasca-Pemilu 2024. Apresiasi Prabowo terhadap institusi negara seperti KPU, Bawaslu, DKPP, TNI-Polri, dan Presiden Jokowi menunjukkan upaya untuk mengukuhkan legitimasi institusional sekaligus membangun continuity discourse dengan pemerintahan sebelumnya.

Menurut Gramsci (1971), hegemoni tidak hanya dicapai melalui kekuatan, tetapi juga melalui konsensus dan kepemimpinan moral dan intelektual. Dalam konteks ini, pidato Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membangun hegemoni dengan merangkul institusi-institusi negara dan elite politik yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan Warburton & Aspinall (2019) tentang "demokrasi oligarkis" di Indonesia di mana transisi kekuasaan sering ditandai oleh kooptasi elite, bukan perubahan struktural yang fundamental.

Ideologi dominan yang direproduksi dalam pidato ini adalah ideologi pembangunan (developmentalisme) yang menjadi ciri khas rezim-rezim pasca-Orde Baru. Fokus pada pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, dan pemberantasan korupsi menunjukkan kontinuitas dengan wacana pembangunan yang selama ini mendominasi politik Indonesia (Hadiz & Robison, 2013).

Level Meso

Analisis pada level meso mengungkap bagaimana institusi-institusi tertentu direpresentasikan dan difungsikan dalam wacana. KPU direpresentasikan sebagai

penyelenggara sukses yang patut diapresiasi. Bawaslu dan DKPP direpresentasikan sebagai pengawas yang berhasil. TNI-Polri direpresentasikan sebagai penjaga keamanan yang andal. Partai politik direpresentasikan sebagai pilar demokrasi yang disebut satu per satu. Media direpresentasikan sebagai pilar demokrasi yang vital meskipun kadang kritis. Representasi ini tidak netral, tetapi sarat dengan fungsi ideologis. Dengan mengapresiasi institusi-institusi tersebut, Prabowo tidak hanya membangun legitimasi bagi dirinya, tetapi juga bagi sistem yang ada. Sebagaimana dicatat oleh Fairclough (2013), wacana elit sering berfungsi untuk mereproduksi struktur sosial yang ada dengan membingkainya sebagai sesuatu yang wajar, normal, dan patut diterima.

Level Mikro: Interaksi Sosial dan Relasi Kuasa

Pada level mikro, analisis berfokus pada bagaimana identitas sosial dan relasi kuasa dikonstruksi melalui interaksi simbolis dalam pidato. Penggunaan sapaan akrab "Mas" kepada Anies dan Muhaimin, sementara kepada Ganjar dan Mahfud menggunakan sapaan formal "Pak" dan "Prof," menunjukkan nuansa relasi yang berbeda. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai strategi untuk membangun kedekatan khusus dengan pasangan 01 yang dianggap sebagai lawan utama.

Relasi kuasa dengan rakyat dikonstruksi melalui bahasa pelayanan: "*Saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia.*" Ini memposisikan Prabowo sebagai abdi negara, bukan penguasa. Relasi kuasa dengan institusi dikonstruksi melalui ucapan terima kasih dan penghormatan, yang menunjukkan pengakuan atas otoritas institusi tersebut.

Pidato sebagai Strategi Hegemonik

Berdasarkan analisis integratif terhadap ketiga dimensi Van Dijk, dapat disimpulkan bahwa pidato perdana Prabowo Subianto berfungsi sebagai strategi hegemonik yang kompleks untuk mengonsolidasikan kekuasaan pasca-Pemilu 2024. Pada level teks, pidato ini dikonstruksi melalui makrostruktur rekonsiliasi yang diwujudkan melalui strategi retorik seperti netralisasi polaritas, metafora keluarga, eufemisme, dan presuposisi. Pada level kognisi sosial, pidato ini merepresentasikan mentalitas kolektif pasca-pemilu—keletihan politik dan aspirasi persatuan—serta mengusung ideologi nasionalis-populis. Pada level konteks sosial, pidato ini beroperasi dalam situasi polarisasi dan berfungsi untuk meredam resistensi, membangun legitimasi, dan memperluas basis dukungan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Van Dijk (2008), kekuasaan dalam masyarakat modern tidak hanya dijalankan melalui koersi, tetapi juga melalui kontrol atas wacana dan produksi kesadaran. Pidato Prabowo adalah contoh sempurna bagaimana seorang pemimpin politik menggunakan bahasa secara strategis untuk membentuk persepsi, memenangkan hati, dan mengkonsolidasikan dukungan. Dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia, kemampuan untuk memobilisasi alat-alat linguistik untuk tujuan politik menjadi keterampilan yang tak kalah penting dari kemampuan mengelola pemerintahan itu sendiri.

Penelitian ini, dengan demikian, tidak hanya mengungkap strategi wacana dalam pidato Prabowo, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kekuasaan direproduksi melalui bahasa dalam konteks politik Indonesia kontemporer.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk terhadap pidato perdana Prabowo Subianto pasca-penetapan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2024, penelitian ini mengungkap tiga temuan utama yang merepresentasikan strategi wacana rekonsiliasi dan legitimasi kekuasaan.

Pertama, pada dimensi struktur teks, pidato Prabowo dikonstruksi melalui makrostruktur yang bertumpu pada tema rekonsiliasi nasional dan ajakan kolaborasi pascakontestasi. Tema besar ini diwujudkan melalui serangkaian strategi retorik yang terstruktur, meliputi: (a) netralisasi polaritas *ingroup-outgroup* melalui narasi empatik dan pengakuan pengalaman pribadi sebagai "yang pernah kalah"; (b) penggunaan metafora keluarga dan kebangsaan yang membingkai perbedaan politik sebagai persoalan internal yang harus diselesaikan secara kekeluargaan; (c) pemanfaatan eufemisme untuk melunakkan realitas konfliktual pascapemilu; serta (d) presuposisi strategis yang menanamkan asumsi tentang legitimasi proses demokrasi dan mandat rakyat bagi agenda rekonsiliasi. Pada level superstruktur, pidato ini mengikuti skema klasik namun dengan penempatan elemen-elemen strategis, terutama penghormatan kepada lawan politik yang disebut sebelum partai koalisi pendukung. Pada level struktur mikro, analisis mengungkap bagaimana pilihan kata, metafora, eufemisme, dan presuposisi bekerja secara sinergis untuk membentuk realitas yang diinginkan penutur.

Kedua, pada dimensi kognisi sosial, pidato ini merepresentasikan mentalitas kolektif publik pasca-Pemilu 2024, terutama keletihan politik dan aspirasi akan persatuan. Representasi ini dibangun melalui pengakuan eksplisit atas keletihan publik serta klaim bahwa rakyat menuntut kolaborasi dari semua unsur pimpinan. Dari aspek ideologis, pidato ini mengusung tiga pilar utama: (a) nasionalisme, yang direpresentasikan melalui penekanan pada identitas kebangsaan dan persatuan sebagai solusi atas polarisasi; (b) populisme, yang tercermin dari fokus intens pada "rakyat" sebagai pusat legitimasi; dan (c) religiusitas inklusif, yang diwujudkan melalui sapaan multireligi di awal dan akhir pidato. Analisis terhadap model mental penutur mengungkap bagaimana latar belakang Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus, pengusaha, dan politisi yang pernah dua kali kalah dalam pilpres dimobilisasi untuk membangun kredibilitas sebagai figur rekonsiliatif. Representasi kelompok dalam pidato ini menunjukkan pola yang konsisten: rakyat direpresentasikan sebagai pihak yang berdaulat tetapi juga "menderita", lawan politik sebagai mitra seperjuangan yang dihormati, partai koalisi sebagai pendukung setia, dan media sebagai mitra kritis yang vital.

Ketiga, pada dimensi konteks sosial, pidato ini berfungsi sebagai strategi hegemonik dalam situasi polarisasi pascapemilu. Pada level makro, pidato ini mengukuhkan legitimasi institusional melalui apresiasi terhadap KPU, Bawaslu, DKPP, TNI-Polri, dan Presiden Jokowi, sekaligus membangun *continuity discourse* dengan pemerintahan sebelumnya. Ideologi pembangunan (*developmentalisme*) direproduksi sebagai ideologi dominan yang menjadi fondasi kebijakan ke depan. Pada level meso, representasi institusi-institusi negara dalam pidato ini berfungsi untuk mereproduksi struktur sosial yang ada dengan membingkainya sebagai sesuatu yang wajar, normal, dan patut diterima. Pada level mikro, analisis interaksi sosial mengungkap bagaimana identitas "kami" sebagai pemenang dan "mereka" sebagai lawan dikonstruksi, namun kemudian dinetralkan melalui strategi-strategi inklusif. Relasi kuasa dengan rakyat dikonstruksi melalui bahasa pelayanan, sementara relasi kuasa dengan institusi dikonstruksi melalui ucapan terima kasih dan penghormatan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pidato perdana Prabowo Subianto bukan sekadar pernyataan kemenangan seremonial, melainkan sebuah praktik diskursif kompleks yang berfungsi sebagai instrumen strategis untuk: (1) menetralkan konflik pascapemilu melalui narasi rekonsiliasi dan ajakan kolaborasi; (2) membangun

legitimasi politik sebagai pemimpin yang sah dan inklusif; (3) mengamankan dukungan politik dari berbagai elemen bangsa; dan (4) membingkai agenda pemerintahan yang akan datang dalam bingkai populis yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Bahasa, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena pertarungan simbolik di mana kekuasaan direproduksi, legitimasi dibangun, dan konsensus diciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mas'udi, H., & Al-A'mery, A. (2021). Fairclough and van Dijk models of critical discourse analysis. *Kufa Journal of Arts*, *1*(48), 437-458. <https://doi.org/10.36317/kaj/2021/v1.i48.537>
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso. (Original work published 1983)
- Barton, G. (2021). *Indonesia's Islamic revolution: Piety and power*. Cambridge University Press.
- Brader, T. (2006). *Campaigning for hearts and minds: How emotional appeals in political ads work*. University of Chicago Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
- Chilton, P. (2004). *Analysing political discourse: Theory and practice*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Eriyanto. (2021). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge. (Original work published 1995)
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, *96*(1), 35-57. <https://doi.org/10.1353/ind.2013.0019>
- Huda, S., & Huda, S. (2018). Analisis teks media. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2582231>
- Indriyawati, L., & Hudiyono, Y. (2023). Analisis wacana kritis model Van Dijk pada berita online pencucian uang pejabat. *JBSI: Jurnal Bahasa dan Sastra*

- Indonesia*, *3*(1), 45-58. <https://doi.org/10.47709/jbsi.v3i01.2298>
- Isnaini, I. (2020). Koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *8*(1), 45-52. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1920>
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press. (Original work published 1980)
- Lestari, M. (2022). Konstruksi ideologi dan citra politik di balik naskah pidato kepresidenan pertama Joko Widodo. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 245-258. <https://doi.org/10.51817/kimli.vi.52>
- Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Mutz, D. C. (2015). *Hearing the other side: Deliberative versus participatory democracy*. Cambridge University Press.
- Nur Budiman, B., Dewi Safitri, B., Rizki Putriga, B., & Julietta Imanuella Wicaksono, V. (2022). Populisme: Konsekuensi dari stagnasi politik dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal PolGov*, *4*(1), 45-78. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916>
- Prabowo Subianto. (2024, Maret). *Pidato perdana Prabowo Subianto pasca-penetapan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia* [Video pidato]. Aula Komisi Pemilihan Umum, Jakarta. <https://www.youtube.com/watch?v=qJFwZzYoyZk>
- Tuty Mutiah, A., Yuda Triantanto, A., Dharma Suriyanto, A., Hardian, A., Kurniawan, F., Albar Pane, I., Fitri, S., & Imron Hamid, A. (2023). Framing media online pada kontestasi "All the President's Men" dan koalisi besar jelang Pilpres 2024. *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi dan Bahasa*, *4*(1), 78-95. <https://doi.org/10.53565/nivedana.v4i1.816>
- Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Van Dijk, T. A. (2014). *Discourse and knowledge: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. In D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Eds.), *The handbook of discourse analysis* (2nd ed., pp. 466-485). Wiley-Blackwell.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: A comparative perspective. *Asian Survey*, *59*(6), 1085-1108. <https://doi.org/10.1525/as.2019.59.6.1085>